
Artikel

Modal Sosial: Seberapa Penting di dalam Keberhasilan Pemberdayaan Nelayan

Jumiati^{1,*}, dan Hidayatul Fajri¹

¹Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang, Indonesia

*Corresponding Author: upikjumiati@yahoo.co.id

Abstract

Empowerment is a process of strengthening and developing personal and community capacity. Thus, the success or failure of empowerment depends on how much the community is able to capitalize on the capital and develop the capacity they have. The main argument in this study is the difference in empowerment success caused by the role of social capital in the community. This research is in the form of a case study conducted in Painan Selatan Village and Carocok Anau Village. Using a semi-structured approach by conducting in-depth interviews. The results showed that fishermen in Painan Selatan Village were able to strengthen trust, increase participation and develop their social values, conditions that were not found in the Carocok Anau Village. This is due to differences in their perceptions of empowerment. Painan Selatan fishermen formulate empowerment as an ongoing process while Carocok Anau Village fishermen consider empowerment as a program sourced from the government.

Keywords: Fisherman Empowerment, Social Capital

Pendahuluan

Pemberdayaan merupakan sebuah proses pembangunan kembali kekuatan personal dan kapasitas masyarakat. Sebagai sebuah proses pembangunan, pemberdayaan memiliki tujuan akhir, yaitu untuk mensejahterakan personal atau masyarakat yang menjadi target dari pemberdayaan. Sehingga, secara konsep pemberdayaan dapat dimaknai sebagai sebuah transformasi sosial. Di mana seseorang atau kelompok masyarakat yang sebelumnya tidak berdaya atau marginal kemudian mampu keluar dari keadaan itu.

Meski begitu, pada praktiknya pemberdayaan seringkali terjebak ke dalam proses birokrasi, dan kemudian dipahami sebagai bentuk bantuan-bantuan sosial yang dikerjakan oleh pemerintah. Pemberdayaan hanya dikerjakan satu arah, top-

down perspective. Kegagalan di dalam memahami konsep pemberdayaan membuat pemberdayaan yang diinisiasi, seringkali oleh pemerintah, gagal menemukan tujuannya.

Padahal pemberdayaan yang berhasil merupakan sebuah proses yang menuntut keterlibatan aktif dari masyarakat. Karena pemberdayaan yang pendekatannya dilakukan dengan mengikuti paradigma bottom-up lebih mendukung terjadinya akumulasi kekuatan sosial yang diperlukan di dalam pemberdayaan (Meyer, 2008; Speer, 1995). Akan tetapi akumulasi kekuatan sosial itu tidak akan terjadi apabila tidak ada modal sosial yang positif di dalam masyarakat.

kegagalan pemberdayaan nelayan di kabupa-

ten Pesisir Selatan, khususnya di dua nagari (desa) yang termasuk nagari dengan jumlah nelayan terbesar di Kabupaten Pesisir Selatan. Kedua nagari (desa) itu adalah Nagari Painan Selatan dan Nagari Carocok Anau. Sedangkan yang dimaksudkan sebagai nelayan di dalam penelitian ini adalah nelayan budidaya. Alasan yang kami ajukan karena kedua nagari (desa) sama-sama melakukan pembudidayaan ikan kerapu pada tahun yang sama, dan pembudidayaan merupakan kegiatan pemberdayaan yang keberhasilan dan kegagalannya dapat diukur dari; pertama, hasil yang dicapai dari budidaya dan, kedua, keberlanjutan dari budidaya tersebut. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa ada perbedaan kondisi yang terjadi di kedua nagari (desa) tersebut. Satu nagari berhasil meningkatkan produksi budidaya yang mereka lakukan dan budidaya yang mereka lakukan tetap berkelanjutan, sedangkan nagari (desa) yang lain berada pada kondisi yang sebaliknya. Dalam hal ini, kami berargumentasi bahwa modal sosial yang ada ditengah masyarakat memainkan peran yang penting atas kondisi yang dicapai.

Modal sosial seringkali dikonsepsi sebagai sumber daya yang didasarkan pada hubungan antar manusia (Kilpatrick, et.,al, 2003). Kebanyakan definisi berfokus pada keanggotaan dalam jaringan dan norma-norma yang membimbing berlangsungnya interaksi. Hal ini pada gilirannya menghasilkan fitur sekunder seperti pengetahuan dan kepercayaan, yang kemudian memfasilitasi hubungan timbal balik dan kerjasama. Misalnya, preferensi yang menyatakan bahwa pendekatan pengembangan masyarakat yang dimulai dari penilaian sumber daya jaringan masyarakat mengadopsi model defisit yang lebih tradisional, dan penggunaan pendekatan partisipatif terhadap rancangan dan implementasi terhadap suatu program, seperti pemberdayaan, peningkatan kapasitas, gerakan sosial masyarakat, dan kebijakan, diyakini memiliki lebih banyak dampak positif daripada pendekatan tradisional (Top-down) (Bank Dunia, 1998; Hibbitt et al., 2001). Selain itu hal yang perlu diperhatikan adalah modal sosial harus dipahami di dalam spektrum lokalitasnya (Narrayan dan Cassidy, 2001).

Konsep modal sosial ini sejalan dengan perspektif pemberdayaan sebagai aksi kolektif

yaitu pemberdayaan merupakan usaha yang bersatu dan sistematis oleh sebuah kelompok masyarakat untuk mendapatkan kontrol dan memperbaiki kehidupan agregat mereka dengan mendefinisikan masalah, aset, solusi, dan proses dimana perubahan dapat terjadi, dan dengan membangun kapasitas individu dan kolektif yang dapat memberi energi pada kekuatan dan pengetahuan yang ada di dalam kelembagaan sosial masyarakat itu sendiri.

Paparan di atas membawa kami untuk kembali mempertanyakan faktor yang mempengaruhi keberhasilan ataupun kegagalan kegiatan pemberdayaan nelayan, khususnya dari perspektif keberadaan modal sosial. Beberapa penelitian yang dilakukan belum melihat modal sosial sebagai sesuatu yang penting di dalam pemberdayaan. Penelitian yang dilakukan oleh Dt. Maani, dkk (2018) cenderung melihat dari tata kelembagaan dan perspektif top-down. Tuwo (2011) melihat keberhasilan pemberdayaan lebih kepada keterbukaan akses terhadap nelayan. Katz (2013) dan Buang, dkk (2011) melihat dari kapasitas nelayan yang kurang di dalam menguasai teknologi. OECD (2013) melihat ketiadaan modal menjadi faktor yang membuat pemberdayaan nelayan gagal. Jackson (2014) dan Wekke dan Cahaya (2015) melihat dari keterbatasan pendidikan dan kurangnya pendidikan nelayan. Sedangkan Suhartini, dkk (2009) melihat dari persaingan yang semakin intensif, mekanisme pasar, posisi tawar nelayan di hadapan tengkulak, keadaan infrastruktur pelabuhan perikanan, dan yurisdiksi otonomi daerah.

Beberapa Penelitian terdahulu tersebut mengungkapkan sebuah realitas bahwa keberhasilan ataupun kegagalan pemberdayaan nelayan dikonstruksi oleh faktor yang multi-dimensional. Meski begitu, belum beberapa penelitian yang melihat keterkaitan pemberdayaan nelayan dengan kapasitas dan kapabilitas yang dimiliki oleh institusi sosial atau dunia internal nelayan itu sendiri, yaitu modal sosial. Padahal, modal sosial dianggap menjadi sebuah faktor yang memberi dampak positif di dalam kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (Thomas, 2002; Kilpatrick, et.,al, 2003; McClenaghan, 2003; Edward dan Onyx, 2007; Bowen, 2009; Enfield dan Nathaniel, 2013).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Kami anggap paling cocok untuk menganalisis fenomena sosial yang kompleks karena memungkinkan untuk pembentukan hubungan antara kejadian-kejadian praktis dan abstraksi teoritis (Stake, 2005) dan memiliki keuntungan karena memberi keleluasaan untuk mengidentifikasi variabel-variabel baru. Pengumpulan data dimulai menganalisis literatur-literatur, dan dokumen-dokumen yang bertujuan untuk melakukan validasi terhadap data-data yang kami dapat di lapangan. Selanjutnya, penelitian ini melakukan wawancara dengan bentuk wawancara semi-terstruktur mendalam dengan responden yang kami anggap memiliki informasi dibutuhkan terkait modal sosial dan pemberdayaan nelayan. Guest, et al (2013) menyatakan bahwa wawancara semi-terstruktur adalah alat yang tepat untuk mengumpulkan informasi dari perspektif individu, yang berfokus kepada pengalaman, keyakinan, dan persepsinya. Selain tentunya juga observasi.

Semua wawancara dilakukan dari bulan Juni hingga awal Agustus 2018. Selanjutnya, informasi yang telah dikumpulkan dianalisis secara tematis untuk mendapatkan jawaban dari penelitian ini.

Hasil dan Pembahasan

Keberhasilan dan Kegagalan Pemberdayaan

Penelitian kami, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, melihat keberhasilan dan kegagalan pemberdayaan di Kabupaten Pesisir Selatan, khususnya di dua nagari (desa) yaitu Nagari Painan Selatan dan Nagari Carocok Anau. Nagari Painan Selatan merupakan nagari dengan jumlah nelayan terbanyak di Kecamatan IV Jurai yaitu 270 orang. Diantaranya 196 sebagai nelayan penuh waktu, artinya orang-orang yang pekerjaan sehari-harinya sebagai nelayan tangkap, atau nelayan budidaya maupun sekaligus keduanya. Sedangkan nelayan sambilan adalah nelayan paruh waktu, yang menjadikan profesi nelayan sebagai pencaharian tambahan. Nelayan sambilan ini berjumlah 74 orang dan mereka juga dapat dikategorikan sebagai nelayan tangkap, atau nelayan budidaya, maupun sekaligus keduanya. Sedangkan di Nagari Carocok Anau yang berprofesi sebagai nelayan sebanyak 680 orang, dan merupakan Nagari (desa) dengan jumlah terbanyak di

Kecamatan Koto XI Tarusan. Diantaranya, seperti di Nagari Painan Selatan, juga dikategorikan sebagai nelayan tangkap, atau nelayan budidaya, maupun keduanya sekaligus.

Nelayan tangkap adalah nelayan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan ke lepas pantai. Biasanya jarak yang ditempuh tergantung dari kapal yang mereka miliki. Besaran itu dapat dikelompokkan; kapal yang kecil dari 5 GT (Gross Ton) disebut sebagai nelayan tangkap kecil, jarak yang dapat mereka capai hanya 2 mil dari bibir pantai. Kapal yang diatas 5 GT sampai kurang dari 30 GT dikategorikan sebagai nelayan tangkap menengah. Jarak tempuh mereka sedikit lebih jauh tapi belum sampai ke ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif). Sedangkan nelayan dengan kapal diatas 30 GT, dikategorikan sebagai nelayan tangkap besar. jarak tempuhnya biasanya sampai ke ZEE. Di Nagari Painan Selatan, kebanyakan nelayannya dapat dikategorikan sebagai nelayan tangkap kecil dan menengah. Sedangkan di Nagari Carocok Anau, beberapa nelayannya dikategorikan sebagai nelayan besar. meskipun mayoritasnya masih merupakan nelayan kecil dan menengah.

Kelompok nelayan yang kedua adalah nelayan budidaya, yang merupakan obyek dari penelitian kami. Nelayan budidaya di Kabupaten Pesisir Selatan merupakan nelayan budidaya yang dikembangkan lewat program pemberdayaan dari pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan lewat Dinas Perikanan, dan dibantu oleh Dinas Perikanan dan Provinsi Sumatera Barat. Jenis budidaya yang dikembangkan yaitu budidaya ikan kerapu. Alasan dari pemilihan budidaya ikan kerapu karena ikan ini merupakan komoditi ekspor dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Sehingga diharapkan mampu memberikan tambahan penghasilan kepada masyarakat.

Budidaya ikan kerapu di Kabupaten Pesisir Selatan, khususnya di Nagari (desa) Painan Selatan dimulai pada tahun 2010 dan Nagari (desa) Carocok Anau dimulai pada tahun 2012. Tujuan dari Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan memberikan pemberdayaan dalam bentuk budidaya kerapu adalah untuk mendiversifikasi ekonomi nelayan sehingga tidak terlalu tergantung kepada hasil tangkap. Apalagi dengan keterbatasan alat tangkap yang dimiliki oleh nelayan, menyebabkan mayoritas nelayan berada pada kondisi ekonomi menengah ke bawah.

Jadi dengan kata lain, nelayan di kedua nagari (desa) itu faktanya tidak bisa dikelompokkan secara terpisah antara nelayan tangkap dengan nelayan budidaya. Walaupun begitu, pembagian

yang kami lakukan bukan bermaksud untuk melakukan simplifikasi tetapi bertujuan untuk menghindari bias di dalam melihat nelayan sebagai sebuah profesi. Alasan kami, pada dasarnya dua kegiatan perikanan tersebut sekaligus dua bentuk profesi yang tidak bisa disamakan oleh sebab proses, keahlian, dan sarana yang digunakan berbeda. Sehingga, meskipun seorang nelayan merupakan nelayan tangkap sekaligus nelayan budidaya, dia bisa dianggap sebagai dua entitas yang berbeda.

Kembali ke kondisi pemberdayaan nelayan budidaya di Nagari Painan Selatan, menjadi hal yang penting untuk menggambarkan terlebih dahulu kronologis dari kegiatan budidaya perikanan di nagari ini. Kepala Kampung Sungai Nipah yang merupakan pusat dari budidaya kerapu di nagari Painan Selatan, menceritakan budidaya di Nagari Painan Selatan dimulai pada tahun 2010. Sebelumnya mereka hanyalah nelayan yang berprofesi sebagai nelayan tangkap dengan menggunakan kapal berukuran rata-rata 7 GT. Sehingga bisa dikelompokkan menjadi nelayan menengah-kecil. Hasil tangkap mereka biasanya hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari.

Kondisi yang seperti itu membuat nelayan di Painan Selatan kemudian menginisiasikan kepada Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan (Waktu itu masih bernama Dinas Perikanan dan Kelautan Pesisir Selatan) untuk memberi bantuan keramba beserta bibit kerapu. Pemikiran itu beranjak dari kegelisahan beberapa orang nelayan melihat kondisi ekonomi yang tidak kunjung membaik. Padahal daerah

mereka memenuhi prasyarat untuk dikembangkannya sektor perikanan budidaya karena kontur nagari mereka yang berteluk sehingga perairannya relatif tenang dan aman dari amukan badai dan arus bawah laut yang kuat.

Usulan itu kemudian ditanggapi oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pesisir Selatan karena sejalan dengan rencana mereka untuk melakukan mengembangkan ekonomi nelayan di Kabupaten Pesisir Selatan lewat program pemberdayaan nelayan di bidang budidaya. Selanjutnya, Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pesisir Selatan memberikan bantuan berupa 200 ekor bibit kerapu beserta 1 lubang keramba untuk percobaan. Bantuan itu diberikan kepada beberapa nelayan untuk dikelola secara mandiri. Namun begitu, percobaan tersebut gagal dikarenakan nelayan tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang pembudidayaan ikan kerapu. Meskipun sebelumnya, Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pesisir Selatan telah memberikan pelatihan pembudidayaan kepada nelayan. Kondisi itu seperti yang diceritakan oleh salah seorang inisiator budidaya ikan kerapu di Nagari Painan Selatan di dalam wawancara kami:

Saya minta bantuan ikan kerapu, kali ini saya benar-benar minta kepada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pesisir Selatan. Karena ikan kerapu itu merupakan ikan ekspor yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Awalnya teman-teman saya yang lain tidak berani, karena takut gagal. Saya sendiri kemudian memberanikan diri, maka diberilah bantuan 200 ekor. Walaupun hasilnya tidak seperti yang kami harapkan.



Gambar 1. Lanskap salah satu pesisir pantai Nagari Painan Selatan

Kegagalan pembudidayaan tidak membuat nelayan di Nagari Painan Selatan berhenti begitu saja. Mereka kembali mengusulkan bantuan kepada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pesisir Selatan bahkan dalam usulan yang jauh lebih besar. Sehingga kemudian pada tahun 2011 nelayan di Nagari Painan Selatan kembali mendapatkan tambahan bantuan berupa bibit sebanyak 4000 ekor dan keramba sebanyak 16 lubang. Bibit dan keramba kemudian dibagi kepada 5 kelompok nelayan. Tetapi pada panen tahun itu, mereka kembali mengalami kerugian. Hasil panen tidak mencapai seperti yang ditargetkan. Hal itu terjadi karena nelayan Nagari Painan Selatan melakukan penyeragaman di dalam pembagian kerja masing-masing kelompok. Setiap anggota bertanggung jawab secara bergantian untuk memberi makan dan melakukan perawatan ikan. Hal ini membuat tidak semua nelayan bertanggung jawab melakukan tugasnya dan seringkali membuat mereka saling lempar tanggung jawab.

Meski begitu, pada tahun 2012 nelayan Nagari Painan Selatan kembali mendapatkan tambahan bantuan 24 lubang keramba. Namun kali ini nelayan Nagari Painan Selatan melakukan model pengelolaan yang berbeda. Pengelolaan kemudian diserahkan kepada masing-masing anggota setelah sebelumnya dibagi ke dalam kelompok-kelompok nelayan budidaya. Tanggung jawab kemudian dibebankan kepada masing-masing anggota meskipun tetap dikontrol oleh ketua nelayan (ketua dari semua

kelompok). Hasil jauh lebih positif daripada sebelumnya, sehingga dapat dikatakan bahwa tahun 2012 merupakan titik balik di dalam usaha pembudidayaan ikan yang mereka lakukan.

Perkembangan usaha nelayan di Nagari Painan Selatan kemudian berlangsung dengan cepat. Pada tahun 2018, nelayan di Sungai Nipah telah memiliki total 186 lubang keramba yang dikelola oleh 16 kelompok nelayan dengan total hasil penjualan lebih dari Rp 1 milyar tahun 2017 (lihat tabel 1). Hasil itu tentu diluar perkiraan nelayan pada saat awal mereka berencana untuk membudidayakan ikan. Tetapi dengan pengelolaan yang mereka lakukan dengan memahami kondisi sosial masyarakat mendatangkan hasil yang justru melebihi ekspektasi awal mereka.

Penghargaan atas kesuksesan nelayan budidaya di Nagari Pesisir Selatan ditandai dengan terpilihnya ketua nelayan budidaya Nagari Painan Selatan sebagai nelayan teladan tingkat nasional pada tahun 2015. Prestasi itu didapatkan dengan alasan bahwa dia sudah menjadi penggerak dari kelompok nelayan yang membuat nelayan di Nagari Painan Selatan keluar dari kemiskinan. Hal itu terlihat dari data kemiskinan Nagari Painan Selatan tahun 2017 yang menyatakan bahwa tidak satupun nelayan yang tergabung ke dalam nelayan budidaya dikategorikan sebagai masyarakat miskin lagi. Selain itu nelayan di Nagari Painan Selatan juga menjadi nelayan dengan terbaik ketiga di tingkat nasional.



Gambar 2. Salah satu keramba budidaya Ikan Kerapu di Nagari Painan Selatan

Tabel 1. Pendapatan Kotor Nelayan Sungai Nipah dari Budidaya Ikan Kerapu per tahun

Tahun	Jumlah Total (Rp)
2011	9.500.000
2012	(tidak tercatat)
2013	398.750.000
2014	156.000.000
2015	555.247.000
2016	955.367.000
2017	1.244.244.000

Sumber: Laporan Penjualan Ikan Kerapu Sungai Nipah, 2017

Kondisi yang sebaliknya terjadi di Nagari Carocok Anau. Sebuah Nagari (desa) yang sebenarnya tidak terlalu jauh dari Nagari Painan Selatan. Nagari Carocok Anau memiliki karakteristik yang hampir sama dengan Nagari Painan Selatan. Nagari Carocok Anau memiliki perairan laut yang sangat bagus untuk dijadikan sebagai usaha kelautan. Posisi nagari ini terlindungi oleh teluk dan pulau-pulau kecil sehingga menjadi dermaga yang aman bagi kapal untuk bersandar. Namun begitu hal itu hanya menjadi sebatas keuntungan geografis saja. Kondisi nelayan di Nagari Carocok Anau masih jauh dari sejahtera, kecuali beberapa yang digolongkan sebagai nelayan pengusaha, yaitu nelayan-nelayan yang memiliki kapal-kapal menengah dan besar.

Budidaya ikan kerapu di Nagari Carocok Anau dimulai hampir bersamaan dengan di Nagari Painan Selatan. Meski begitu, berbeda dengan Nagari Painan Selatan, ide awal untuk pembudidayaan ikan tidak datang dari nelayan itu sendiri tetapi dari Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pesisir Selatan. Dinas

Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pesisir Selatan melihat potensi nelayan Nagari Carocok Anau untuk mengembangkan budidaya ikan kerapu seperti yang terjadi di Nagari Painan Selatan. Sehingga pada tahun 2012 dengan pemberian bantuan 6 aquatec (keramba jaring apung) dengan total keramba 10 lubang yang dibiayai melalui APBD Kabupaten Pesisir Selatan. Pengelolaannya kemudian dilakukan oleh 8 (delapan) kelompok nelayan. Namun budidaya tersebut gagal.

Tahun berikutnya nelayan di Nagari Carocok Anau kembali mendapatkan bantuan, kali ini dari Kementerian Perikanan dan Kelautan lewat dana APBN 2013. Namun masih tetap gagal. Meski begitu, tahun 2013 mereka kembali mendapatkan bantuan dari Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pesisir Selatan. Sehingga pada tahun 2014 total keramba *Aquatec* yang ada di Nagari Carocok Anau sebanyak 50 buah dengan 500 lubang, Jumlah yang sebenarnya lebih besar dari yang didapatkan oleh nelayan di Nagari Painan Selatan.



Gambar 4. Keramba Budidaya Ikan Kerapu di Nagari Carocok Anau

Dituturkan oleh Ketua Nelayan Nagari Carocok Anau bahwa pada awalnya nelayan di Nagari Carocok Anau sangat antusias dengan program pemberdayaan yang diberikan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Pesisir Selatan ini. Harapan nelayan, pemberdayaan ini akan mampu menambah pendapatan mereka. Tetapi pada panen pertama hasil yang didapat sangat jauh dari yang diharapkan. Nelayan merugi dan sebagian memutuskan untuk keluar dari kelompok budidaya. Walaupun beberapa masih tetap melanjutkan. Namun begitu, pada tahun berikutnya nelayan Nagari Carocok Anau kembali merugi. Panen mereka gagal untuk kedua kalinya. Hal ini kemudian membuat hampir semua nelayan mundur dari kegiatan pemberdayaan. Sehingga untuk selanjutnya, keramba aquatec yang ada diserahkan kepada nelayan yang tetap mau melanjutkan usaha budidaya ikan kerapu.

Sehingga, pada saat ini jumlah *aquatec* yang berjumlah 50 buah itu tidak lebih dari 25% yang masih digunakan oleh nelayan, sedang sisanya dibiarkan saja kosong. Alasan nelayan tidak menggunakannya adalah karena mereka selalu merugi setiap kali panen. Ditambah dengan waktu panen yang lama 12 sampai dengan 14 bulan membuat biaya produksi membengkak. Selain itu, harga jual dari kerapu yang di bawah harga pasar juga menjadi alasan yang membuat nelayan kemudian memutuskan untuk tidak melanjutkan kegiatan budidaya kerapu.

“Setelah tahun 2014 budidaya kerapu praktis sudah tidak jalan, hanya beberapa nelayan saj yang tetap melanjutkan. Kami sempat mencoba secara berkelompok selama tiga tahun; 2012, 2013, 2014. Setelah 2014 pengelolaan tidak lagi secara berkelompok karena banyak kelompok nelayan (budidaya kerapi) tidak aktif. Akhirnya dipakai oleh siapa yang mau saja.... Alasannya, karena tidak menguntungkan. Harganya jual tidak menutupi biaya selama produksi, Sehingga nelayan merugi. Itu karena kami bisa menjual hanya ke satu pembeli. Jadi harga ditentukan oleh mereka. Berapapun harga yang diminta, yang kadang jauh dari harga pasar. Kalau di jual lokal juga tidak ada yang mampu untuk membeli. Jadi, sekarang budidaya kerapu itu sudah tidak jalan lagi. (Wawancara dengan Ketua Kelompok Nelayan Budidaya ikan kerapu Nagari Carocok Anau)

Kegagalan budidaya yang terjadi di Nagari Carocok Anau bagi sebagian nelayan adalah kegagalan dari proses pemasaran. Meski begitu,

hal itu tidak bisa memberikan analisis yang menyeluruh untuk mengetahui jawaban dari kegagalan mereka. Walaupun memang indikasi dari penelitian kami melihat bahwa pasar yang tersedia berupa pasar monopsoni, di mana hanya ada satu pembeli yang memonopoli yaitu PT Dempo. Tetapi tempat pengumpulan ikan PT Dempo sebelum di ekspor berada tidak jauh dari Nagari Carocok Anau. Harga yang dibeli pun juga tidak terlalu di bawah harga pasar dalam negeri. Karena budidaya kerapu di Nagari Painan Selatan juga memiliki pasar atau pembeli yang sama. Sehingga, alasan yang disampaikan oleh nelayan di Nagari Carocok Anau tidak bisa diterima sepenuhnya begitu saja bahwa kegagalan itu lebih disebabkan oleh keberadaan pasar.

Kami melihat bahwa perbedaan hasil dari budidaya di Nagari Painan Selatan dan Nagari Carocok Anau lebih diakibatkan oleh pengelolaan yang dilakukan. Budidaya di Nagari Painan Selatan mampu memberikan hasil yang berdampak terhadap ekonomi mereka dan sampai sekarang budidaya masih tetap berjalan. Sedangkan di Nagari Carocok Anau terjadi kondisi yang sebaliknya. Hal ini mengindikasikan ada perbedaan pengelolaan yang dilakukan.

Hasil penelitian kami memperlihatkan bahwa nelayan budidaya di Nagari Painan Selatan di dalam mampu memanfaatkan modal sosial positif yang telah ada ditengah mereka dan mengembangkannya. Kondisi yang tidak ditemukan di Nagari Carocok Anau. Beberapa komponen modal sosial kami temukan sebagai penyebab perbedaan itu. Selanjutnya kami akan membahas perbedaan modal sosial yang ada di dua nagari/desa itu sehingga memberikan sebuah analisis tentang pentingnya keberadaan modal sosial masyarakat di dalam kegiatan pemberdayaan.

Modal Sosial di dalam Pemberdayaan Nelayan

Kondisi dari karakteristik masyarakat khususnya nelayan membuat kami mengidentifikasi beberapa komponen pembentuk modal sosial yang bekerja di Nagari Painan Selatan dan yang tidak bekerja di Nagari Carocok Anau, yaitu nilai-nilai sosial dan trust. Dalam hal ini kami bukan mengabaikan komponen-komponen yang lain di dalam literatur modal sosial, seperti *reciprocity*, aksi kolektif, ataupun *network*. Tetapi kami melihat bahwa komponen seperti nilai-nilai sosial dan trust lebih teramati di dalam penelian ini sebagai komponen modal sosial yang memiliki

dampak di dalam keberhasilan dan kegagalan pemberdayaan nelayan budidaya di Kabupaten Pesisir Selatan.

Pertama kami akan membahas tentang perbedaan nilai-nilai sosial nelayan. Nilai-nilai sosial umumnya dipengaruhi oleh budaya masyarakat. Nelayan di Nagari Painan Selatan dan Nagari Carocok Anau secara budaya tidak memiliki perbedaan yang mencolok, sebab masih merupakan bagian dari entitas budaya Minangkabau. Meski begitu, kami melihat bahwa nilai-nilai sosial juga dibentuk oleh pola interaksi yang ada diantara masyarakat. Salah satunya kebaharuan integrasi masyarakat.

Nelayan di Nagari Painan Selatan tersebar di beberapa tempat di Nagari tersebut, terutama di sekitar pantai carocok Painan dan di Sungai Nipah. Khusus untuk nelayan budidaya hampir semuanya terpusat di Kampung Sungai Nipah. Sedangkan di Nagari Carocok Anau yang menjadi nelayan budidaya tersebar di beberapa kampung. Sebagai sebuah kampung, sungai nipah relatif baru berkembang dan rata-rata penduduknya baru menetap satu atau dua generasi. Sebelumnya kampung sungai nipah hanya menjadi huma atau ladang di bukit-bukit yang tidak jauh dari pantai. Kemudian, beberapa orang dari nagari ataupun kampung yang bersebelahan datang untuk menetap. Dan relatif baru saat sebagian penduduknya berprofesi menjadi nelayan. Seperti kutipan wawancara kami dengan salah seorang ketua adat di Nagari Painan Selatan:

“Painan ini dulunya hanya terdiri dari satu nagari saja. Tetapi kemudian dikembangkan menjadi tiga nagari. Jadi sebenarnya masyarakatnya masih banyak yang berkerabat. Tetapi kalau di sungai nipah, kebanyakan penduduknya itu pendatang. Maksudnya, orang yang datang dari nagari diluar painan seperti sungai bungin ataupun batang kapas. Ada juga yang asli dari Painan tetapi tidak seberapa dan tidak

menjadi nelayan. Rata-rata yang menjadi nelayan itu pendatang. Karena mereka tidak punya tanah jadi mereka melaut.”

Masyarakat yang secara sosio-historis relatif baru itu bukan berarti tidak ada nilai-nilai di dalam masyarakatnya, nelayan di Nagari Painan Selatan khususnya nelayan budidaya di Sungai Nipah menunjukkan bahwa ada nilai-nilai yang mereka anut, bukan saja nilai tradisional tetapi nilai-nilai aktual yang mereka bentuk hasil dari interaksi dan integrasi mereka. Salah satunya adalah keluwesan mereka di dalam menerima kebaharuan atau inovasi, sehingga pemberdayaan budidaya ikan bisa berjalan.

Sedangkan Nagari Carocok Anau adalah nagari yang masyarakatnya sudah lama mendiami wilayah tersebut. Masyarakat di Nagari Carocok Anau pun cenderung homogen karena tidak banyak pendatang yang menetap di nagari itu. Selain itu, nelayan juga merupakan profesi yang sudah turun temurun di sana. Hal ini menyebabkan kondisi nelayan cenderung statis dan sulit untuk menerima kebaharuan. Termasuk di dalam menerima pembaharuan pemberdayaan yang berbentuk budidaya. Sebab, bagi mereka tradisi nelayan adalah menangkap ikan ke laut bukan dengan cara membudidayakanya.

Perbedaan karakteristik itu menjelaskan bahwa keberadaan masyarakat pedesaan bukan saja dipengaruhi oleh nilai-nilai tradisional, yang kadang cenderung tidak bisa menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan masyarakatnya. Walaupun masyarakat itu sudah hidup bersama dalam kurun waktu yang lama belum menjadi suatu jaminan modal sosial yang ada di dalamnya berbentuk positif dan bermanfaat, tetapi “semangat” dan ruh sosial menjadi kekuatan pengikat kehidupan kolektif mereka membuat modal sosial bisa dikapitalisasi untuk mencapai tujuan bersama (Pranadji, 2006; Yuanjaya, 2015).



Gambar 5. Perbedaan Ukuran Kapal yang dimiliki oleh nelayan ke dua nagari (Nagari Painan Selatan (kiri); Nagari Carocok Anau: (kanan))

Komponen yang kedua yaitu keberadaan trust. Trust merupakan *necessary condition* di dalam modal sosial, karena dengan trust orang-orang kemudian bisa bekerja lebih efektif. Modal sosial dalam konteks ini mengacu pada kepercayaan dan berbagi norma perilaku yang muncul dalam jejaring sosial informal dan yang menghasilkan eksternalitas untuk anggota kelompok (Durlauf & Fafchamps, 2004). Itu mempengaruhi sumber daya itu seorang individu dapat memobilisir melalui jejaring sosialnya (Woolcock & Narayan, 2000) dan kecenderungan komunitas anggota untuk terlibat dalam aksi kolektif (Ostrom & Ahn, 2002). Tetapi trust tidak bisa dipahami sebatas masalah personalitas seseorang atau intrapersonal, melainkan harus dipahami sebagai bentuk yang ekstrapersonal dan intersubyektif. Trust dibangun lewat interaksi yang terjalin di dalam masyarakat. Dengan kata lain, masyarakat yang memiliki kekerabatan ataupun berbentuk tradisional dan homogen belum bisa dipastikan memiliki trust, ataupun memiliki tetapi dengan kadar yang rendah.

Kondisi yang terjadi di kedua nagari adalah Nelayan budidaya di Nagari Painan Selatan mampu untuk membangun trust di tengah-tengah mereka sedangkan nelayan Nagari Carocok Anau cenderung gagal. Kemampuan nelayan budidaya di Nagari Painan Selatan, khususnya di Sungai Nipah, dikarenakan belum terciptanya hierarki sosial-ekonomi di dalam masyarakatnya yang baru terbentuk. Ketiadaan hierarki itu menyebabkan tidak adanya klas-klas sosial dan kecurigaan antar klas-klas sosial. Sedangkan nelayan budidaya di Nagari Carocok Anau tidak mampu menciptakan trust diantara mereka diakibatkan adanya hierarki sosial-ekonomi. Sehingga yang berkembang di tengah nelayan adalah kecurigaan-kecurigaan.

Hierarki sosial-ekonomi itu dibentuk oleh kepemilikan mereka terhadap alat produksi, yaitu kapal. Hal ini menjadi penting karena yang menjadi nelayan budidaya di kedua nagari adalah nelayan tangkap. Nelayan budidaya di Nagari Painan Selatan merupakan kelompok nelayan tangkap yang memiliki kapal meskipun kapal dengan ukuran kecil-menengah dengan rata-rata berukuran 7 GT. Sedangkan nelayan budidaya di Nagari Carocok Anau merupakan kelompok nelayan yang dibentuk di dalam relasi nelayan tangkap yang memiliki kapal dan tidak. Terdapat klas pemilik kapal dan nelayan buruh di dalam relasi mereka saat berinteraksi. Selain itu, di dalam nelayan budidaya yang memiliki kapal pun

terdapat perbedaan klas lain, yaitu pemilik kapal besar, menengah, dan kecil.

Di dalam pemberdayaan, nilai-nilai sosial dan trust menentukan integrasi nelayan ke dalam jaringan kerjasama. Dengan kata lain, pemberdayaan merupakan suatu bentuk kerjasama diantara nelayan yang merupakan obyek dari kegiatan pemberdayaan. Sebab dengan adanya kerjasama akan meningkatkan hasil kerja kelompok selain juga adanya perasaan menyatu ke dalam kelompok (Cunningham, 2002). Kondisi ini yang terjadi di pemberdayaan nelayan budidaya Kabupaten Pesisir Selatan. Kemampuan nelayan budidaya Nagari Painan Selatan untuk berkerjasama di dalam kelompok membuat mereka mampu meningkatkan kondisi ekonomi mereka. Sedangkan hal yang sebaliknya terjadi di Nagari Carocok Anau. Kegagalan mereka terintegrasi ke dalam kelompok untuk bekerjasama menjadikan pemberdayaan yang telah dilakukan tidak mendapatkan hasil yang diinginkan.

Penutup

Hasil penelitian menunjukkan perbedaan hasil pemberdayaan yang terjadi di Nagari Painan Selatan dan Nagari Carocok Anau Perbedaan tersebut disebabkan oleh modal sosial yang ada antara nelayan di kedua nagari. Komponen modal sosial yang teramat menyebabkan perbedaan adalah nilai sosial dan kepercayaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai sosial tidak hanya dibentuk oleh nilai-nilai tradisional, yang bahkan cenderung menghambat integrasi masyarakat, tetapi nilai-nilai yang mereka ciptakan dari hasil interaksi mereka setiap hari. Terkait dengan nilai-nilai sosial, kondisi masyarakat sangat menentukan pertumbuhan nilai ini. Penelitian kami menunjukkan bahwa nilai-nilai sosial tidak berkembang dalam masyarakat yang statis dan tertutup seperti di Nagari Carocok Anau, tetapi akan berkembang dalam masyarakat yang dinamis dan terbuka seperti Nagari Painan Selatan. Kepercayaan juga merupakan komponen penting dalam modal sosial. Kepercayaan di Nagari Painan Selatan muncul dalam interaksi di antara para nelayan karena mereka merasakan perasaan persamaan nasib. Serta stratifikasi sosial yang hampir merata di antara mereka yang dipengaruhi oleh kepemilikan modal mereka. Sementara itu, di sisi lain, nelayan budidaya di Nagari Carocok Anau berada dalam kondisi ketidakpercayaan yang disebabkan oleh kelas sosial dan ekonomi yang

ada di antara mereka. Kami dalam penelitian ini kembali memperkuat argumen bahwa masyarakat, dalam hal ini adalah nelayan, merupakan bagian pemangku kepentingan yang memainkan peran penting dalam keberhasilan pemberdayaan. Dengan demikian, masyarakat bukanlah ruang kosong yang bisa dimasuki oleh pemerintah tanpa mengetahui dinamika yang ada di masyarakat. Pengetahuan itu sangat penting jika pemerintah menginginkan arus baru dalam menjalankan kebijakan dan tata kelola yang mereka lakukan.

Daftar Pustaka

- Bowen, G. A. 2009. Social Capital, Social Funds and Poor Communities: An Exploratory Analysis. *Journal: Social Policy & Administration*. Jun2009, Vol. 43 Issue 3, p245-269.
- Buang, A., A. Habibah, J. Hamzah and Y. S. Ratnawati. 2011. The promise of community - based fishery resource management. *World Applied Sciences Journal*. 13 (13), 104-109.
- Cunningham, I. 2002. Developing Human and Social Capital in Oeganizations. *Industrial and Commercial Training*. Vol 34 (4) 89-94.
- Dt. Maani, K., A. Fernaldi and H. Fajri. 2018. Fisherman empowerment and poverty in Pesisir Selatan regency. MATEC Web of Conferences 229, 01004.
- Durlauf, S. N. and M. Fafchamps. 2004. Social capital. NBER Working Paper 10485. Cambridge, MA: NBER
- Edwards, M and J. Onyx. 2007. Social Capital and Sustainability in a Community under Threat. *Journal: Local Environment*. Feb2007, Vol. 12 Issue 1, p17-30.
- Enfield, R. P and K. C. Nathaniel. 2013. *Social capital: Its constructs and survey development*. *Journal: New Directions for Youth Development*. Summer2013, Vol. 2013 Issue 138, p15-30.
- Guest, G., E. M. Namey and M. L. Mitchell. 2013. *Collective qualitative data: A field manual for applied research*. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Hibbit, K., P. Jones., and R. Meegan. 2001. Tackling Social Exclusion: The Role of Social Capital in Urban Regeneration on Merseyside. *Journal: European Planning Studies*, 9 ,pp. 141-161.
- Jackson, P. S. B. 2014. The Crisis of the Disadvantaged Child: Poverty Research, IQ, and Muppet Diplomacy in the 1960s. *Antipode*. 46 (1), 190-208.
- Katz, M. B. 2013. The Land of Too Much: American Abundance and the Paradox of Poverty. *Journal Of American History*. 100 (3), 900-901.
- Kilpatrick, S., J. Field and Ian Falk. 2003. Social Capial: An Analytical Tool for Exploring Lifelong Learning and Community Development. *British Educatioal Research Journal*, Vol. 29. 3. 2003, pp. 417-433.
- Mc Clenaghan, P. 2003. Response to 'Social Capital: an analytical tool for exploring lifelong learning and community development'. *British Educational Research Journal*. Jun2003, Vol. 29 Issue 3, p435- 5p.
- Meyer, M and K. N. Rankin. 2012. Social Capital and (Community) Development: A North/South Perspective. *Editorial Board of Antipode*, pp 804-808.
- Narayan, D and F. M. Cassidy. 2001. A Dimensional Approach to Measuring Social Capital. *Development and Validation of a Social Capital Inventory*. Vol. 49(2): 59-102.
- OECD. 2013. *Competition and Poverty Reduction*. Directorate for Financial and Enterprise Affairs.
- Ostrom, E. and T. K. Ahn. 2002. A social science perspective on social capital: Social capital and collective action. In E. Ostrom, et al. (Eds.), *Social capital: Conceptual exploration* (pp. 8-56). Exeter: University of Exeter
- Pranadji, T. 2006. Penguatan Modal Sosial untuk Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan dalam Pengelolaan Agroekosistem Lahan Kering (Studi Kasus di Desa-desa (Hulu DAS) Ex Proyek Bangun Desa, Kabupaten Gunung Kidul dan Ex Proyek Pertanian Lahan Kering, Kabupaten Boyolali). *Jurnal Agro Ekonomi* Vol. 24 (2).
- Speer, P. W. and J. Hughey. 1995. *Community Organizing: An Ecological Route to Empowerment and Power*, *American Journal of Community Psychology*, Vol. 23, No. 5, 1995: pp.729-748
- Stake, R. E. 2005. Qualitative case studies. In N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (Eds.), *The Sage handbook of qualitative research* (3rd ed., pp. 443-466). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Suhartini (ed). 2009. *Model-model Pemberdayaan Masyarakat.. Bantul: Pustaka Pesantren*.
- Thomas, E. P. 2002. Local Participation in Development Initiatives: The Potential Contribution of An Understanding of Social Capital. *Journal: Urban Forum*. Apr2002, Vol. 13 Issue 2, p116.
- Tuwo, H. A. 2011. *Pengelolaan Ekowisata Pesisir dan Laut*. Surabaya: Brilian Internasional.
- Wekke, Ismail Suardi, dan Andi Cahaya. 2015. Fishermen Poverty and Survival Strategy: Research on Poor Households in Bone Indonesia. *Procedia Economics and Finance* 26 (2015) 7-11.
- Woolcock, M. and D. Narayan. 2000. Social capital: Implications for development theory, research and policy. *World Bank Research Observer*, 15(2), 225-249.
- World Bank. 1998. *The Initiative on Defining, Monitoring and Measuring Social Capital: overview and program description*. Social Capital Initiative Working Paper No. 1 (Washington, DC, World Bank Social Development Family Environmentally and Socially Sustainable Development Network).
- Yuanjaya, P. 2015. Modal Sosial dalam Gerakan Lingkungan: Studi Kasus di Kampung Gambiran dan Gondolayu Lor, Kota Yogyakarta. *Jurnal Natapraja: Kajian Ilmu Administrasi Negara* 3 (1).